

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemeriksaan Keuangan

1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Pada dewasa ini auditing pemeriksaan akuntansi dalam suatu perusahaan dirasakan mempunyai peranan yang lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Hal ini disebabkan karena perkembangan perusahaan yang begitu pesat sehingga mengakibatkan bertambah kompleksnya bidang usaha. Dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut maka diperlukan suatu system kontrol yang tepat untuk dapat mengawasi kegiatan perusahaan sehingga dapat dicapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

Auditing merupakan salah satu jasa profesional yang diberikan oleh akuntan publik dibidang pemeriksaan laporan keuangan disamping jasa profesional lainnya yang berhubungan dengan pembukuan, pajak dan lain-lain. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan yang bersangkutan, sehingga kewajaran penyajian laporan keuangan itulah ditunjuk akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya sehingga, bagi para pemakai laporan keuangan pendapat tersebut

dapat menambah kredibilitas laporan keuangan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

Sebagai gambaran selanjutnya akan dikemukakan beberapa definisi mengenai auditing bahwa :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang obyektif terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pimpinan perusahaan kemudian memberikan pernyataan apakah laporan keuangan tersebut telah memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan tersebut”.
(Abadi Yusuf : 1993)

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas maka dapatlah diketahui bahwa pemeriksaan akuntansi atau auditing merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan penelitian atas data administrasi serta hal-hal lain yang dijadikan dasar untuk menyusun laporan tersebut yang disertai dengan penilaian apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan definisi yang telah disebutkan di atas maka dapatlah diketahui bahwa pemeriksaan mengenai akuntansi atau auditing merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan penelitian atas data administrasi serta hal-hal lain yang dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan yang telah disajikan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan definisi auditing yang lain adalah sebagai berikut :

“Auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related to a specific economic entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information established criteria”.
(Arens : 1991)

Maksudnya auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan-keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa auditing mencakup beberapa unsur penting yang diuraikan sebagai berikut :

1. *Determining the degree of correspondence between quantifiable information and established criteria.*

Diperlukan keterangan-keterangan dalam bentuk yang dapat diukur dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai pegangan untuk mengevaluasi keterangan tersebut.

2. *Economic entity*

Harus ada penegasan mengenai kesatuan ekonomi yang diperiksa dan periode waktu, sehingga tanggung jawab pemeriksa dapat dinyatakan secara jelas.

Kesatuan ekonomi dalam arti kesatuan hukum seperti terbatas, unit-unit pemerintah, persekutuan (partnership) dapat juga dalam bentuk divisi, departemen ataupun perorangan. Periode waktu pemeriksaan meliputi satu tahun, satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun dalam beberapa kasus dapat berlangsung selama hidup perusahaan.

3. *Accumulating and evaluating*

Untuk mencapai sasaran kegiatan auditing diperlukan bukti yang mencukupi dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan harus mengumpulkan bukti dan mengevaluasinya sebagai bahan untuk menunjang pendapatan akuntan. Bahan pembuktian dapat bermacam-macam meliputi keterangan lisan dari yang diperiksa (auditee), pihak luar perusahaan atau hasil pemeriksaan sendiri.

4. *Competen Independent Person*

Pemeriksa harus memahami kriteria yang digunakan dan harus ahli mengelompokkan jenis-jenis dan jumlah bukti yang dibutuhkan dalam rangka memberikan kesimpulan yang tepat. Pemeriksa yang harus memiliki sifat mental yang bebas dalam bertindak.

5. *Reporting*

Proses pemeriksaan diakhiri dengan laporan audit yang isinya mengenai hasil pemeriksaan dan merupakan alat komunikasi untuk mengemukakan apa yang telah ditemukan pemeriksa kepada para pemakai laporan.

Pada dasarnya auditing bersifat analitis yaitu menguraikan suatu informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapat akuntan mengenai kelayakan penyajian atas laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku umum di Indonesia telah diterapkan secara konsisten.

2. **Perbandingan Pemeriksaan Ekstern dengan Pemeriksaan Intern**

Walaupun terdapat kesamaan antara pemeriksaan intern dengan pemeriksaan ekstern dalam area audit financial, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua tipe audit tersebut.

Perbedaan-perbedaan itu diringkaskan sebagai berikut :

No.	Karakteristik	Pemeriksaan Ekstern	Pemeriksaan Intern
1.	Pelaksanaan	Oleh profesional yang berpraktek di luar organisasi	Oleh karyawan dalam organisasi

2.	Perhatian utama	Melayani kebutuhan pihak ketiga, misalnya pemegang saham	Melayani kebutuhan organisasi
3.	Periode	Penilaian berkala	Penelaahan yang terus menerus
4.	Tujuan penelaahan	Untuk menentukan keandalan laporan keuangan	Untuk melakukan perbaikan dan menyebabkan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur.
5.	Independensi	Independen dalam fakta dan penampilan	Auditor secara organisasional independen, akan tetapi siap menanggapi kebutuhan dan keinginan manajemen
6.	Pendeteksian kecurangan	Secara insidental memberikan perhatian pada pencegahan dan deteksi kecurangan	Secara langsung memberi perhatian pada pencegahan dan deteksi kecurangan.

Sumber : Audit manajemen Kontemporer

3. Perbandingan Pemeriksaan Operasional dengan Pemeriksaan Keuangan

Pada umumnya pemeriksaan operasional memerlukan tenaga tim yang mempunyai latar belakang akademis, keterampilan teknis dan pengalaman. Pemeriksaan seperti ini mencakup suatu ruang lingkup penelaahan yang lebih luas daripada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan ketaatan. Beberapa perbedaan pokok antara pemeriksaan operasional dan pemeriksaan keuangan diikhtisarkan sebagai berikut :

No.	Karakteristik	Pemeriksaan Operasional	Pemeriksaan Keuangan
1.	Tujuan	Menilai dan memperbaiki metode dan kinerja manajemen	Menyatakan pendapat atas kondisi keuangan dan kepengurusan
2.	Ruang lingkup	Fungsi usaha atau sub unit yang saling berhubungan	Catatan keuangan organisasi secara keseluruhan
3.	Keperluan	Opsional	Secara hukum disyaratkan (untuk perusahaan go publik)
4.	Frekuensi	Ad hoc	Reguler paling sedikit setahun sekali
5.	Orientasi waktu	Berorientasi ke masa depan	Retrospektif
6.	Metode	Penekanan kepada keterampilan interdisiplin	Penekanan kepada keterampilan akuntansi
7.	Realisasi	Potensial	Aktual
8.	Persyaratan laporan	Laporan yang komprehensif termasuk tujuan, ruang lingkup, pendekatan, temuan dan rekomendasi	Secara normal laporan bentuk pendek untuk menyertai laporan keuangan.
9.	Penerima	Manajemen intern	Pemegang saham eksternal, pemerintah dan publik.

Sumber : Audit manajemen Kontemporer

B. Pemeriksaan Intern

1. Pengertian Pemeriksaan Intern

Untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang pemeriksaan intern, sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari akuntansi serta hubungan antara akuntansi itu sendiri dengan pemeriksaan akuntan (auditing). Setelah itu kita dapat mengetahui apa sebenarnya pengertian dari pemeriksaan intern tersebut.

Terdapat berbagai definisi yang menguraikan arti akuntansi seperti antara lain tersebut dibawah ini. Menurut Soemarso (1990) dalam akuntansi suatu pengantar, pengertian akuntansi ialah :

“Suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien”.

Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut kamus akuntansi disusun oleh Abdullah (1995), pengertian akuntansi tersebut adalah :

“Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, melaporkan serta menganalisa transaksi-transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain akuntansi memberikan

informasi tentang milik dan hak milik dan sejauh mana milik dan hak milik tersebut dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan”.

Disebut seni atau art adalah karena adanya beberapa bagian dalam proses akuntansi yang tak dapat di kalkulasi secara tepat seperti penentuan besarnya cadangan pintu ragu-ragu dan sebagainya.

Dalam buku yang diterjemahkan oleh Tjakra Kusuma dan Wibowo (1994), menyatakan bahwa pengertian dari akuntansi tersebut adalah :

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan”.
(Alvin A. Arens)

Berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi tersebut agar dalam menyampaikan informasi keuangan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga informasi tersebut merupakan informasi yang dapat dimengerti dan diketahui maksud dan maknanya.

Dengan menggunakan teknik-teknik pencatatan, teknik pengawasan, teknik penyajian dan teknik lainnya diharapkan informasi tersebut memang dapat digunakan perusahaan dalam kegiatannya sehingga tingkat efisiensi yang tinggi dapat dicapai oleh perusahaan.

Setelah mengetahui pengertian dari akuntansi maka selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari auditing atau pemeriksaan akuntan.

Pengertian auditing :

Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan criteria yang telah diterapkan. (Arens dan James K.L. : 1994)

Sedangkan menurut Kamus Akuntansi pengeritan auditing adalah :

1. Verifikasi data akuntansi (accounting data) untuk menentukan ketelitian dan kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan manajemen.
2. Pemeriksaan obyektif atas laporan keuangan yang disertai pertanyaan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. (Abdullah : 1991)

Dari definisi auditing dan akuntansi yang ada di atas dapat dikatakan bahwa hubungan antara akuntansi dan auditing merupakan dua bidang ilmu yang saling melengkapi satu sama lain. Akuntansi menyajikan suatu informasi yang dibutuhkan untuk melaporkan catatan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, yang akan digunakan untuk alasan yang berbeda-beda. Agar laporan keuangan memang telah disajikan dengan benar sesuai dengan keadaan yang

terjadi maka dilakukan suatu pemeriksaan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan telah mencerminkan dengan benar peristiwa yang terjadi sepanjang periode akuntansi. Untuk dapat melakukan pemeriksaan dengan baik maka orang yang melakukan pemeriksaan tersebut juga harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan harus mempunyai keahlian dalam pengumpulan dan penginterpretasian bukti pemeriksaan serta mentaati norma pemeriksaan yang berlaku. Dalam buku Auditing Prinsip Prosedur disebutkan bahwa :

Akuntansi dan pemeriksaan merupakan rekan usaha yang saling melengkapi, bukan seperti hubungan orang tua dan anaknya. Akuntansi merupakan kegiatan pelayanan jasa berupa penyediaan informasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu pemilik, manajemen, kreditur, investor, instansi pemerintah, dan lain-lain. Tugas akuntansi adalah mengurangi informasi yang terlalu detail sedemikian rupa, sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya. Dalam pemeriksaan data akuntansi perlu memperhatikan apakah informasi akuntansi yang dicatat untuk suatu satuan ekonomi yang timbul selama periode akuntansi yang diperiksa. (Kosasih : 1993)

Dalam melakukan pemeriksaan data akuntansi, yang menjadi masalah utama adalah apakah informasi tersebut memang mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang periode akuntansi, agar dapat memeriksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada maka setiap auditor yang terlibat di dalamnya harus memahami peraturan dengan baik agar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku (*generally accepted accounting principles*). Pemeriksaan tidak berpedoman pada informasi akuntansi yang diperiksa tetapi berpedoman pada ide dan metode yang tepat untuk menilai kebenaran (*validity*) laporan keuangan objek yang diperiksanya. Menurut Kosasih (1993), setiap penyajian laporan keuangan dianggap salah, bila dipengaruhi oleh :

1. Prasangka pribadi (*personal bias*)
2. Kepentingan pribadi (*self interest*)
3. Kecerobohan (*carelessness*)
4. Ketidakjujuran (*dishonesty*)

Pengertian tentang kegiatan-kegiatan dan cara memeriksa, merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pemeriksa. Tujuan dan teknik pemeriksaan dari sejak dahulu telah mengalami perkembangan, dewasa ini tujuan pemeriksaan adalah :

1. Pemeriksaan mempunyai tujuan untuk menentukan kelayakan laporan keuangan posisi keuangan (*neraca*) tetapi juga untuk menentukan kelayakan hasil laba operasi, laba yang ditahan dan perubahan arus kas.
2. Pemeriksaan pada dasarnya adalah *system*: dari prosedur-prosedur pemeriksaan yang kebanyakan merupakan pengujian.

Pengujian agar dapat menemukan kecurangan, penyimpangan dan kesalahan bila ada.

Pemeriksaan itu sendiri dalam buku Auditing Prinsip dan Prosedur, didasari oleh konsepsi pemeriksaan (auditing concept)

yaitu ide falsafah pemeriksaan yang terdiri dari :

1. Pembuktian pemeriksaan (evidence) yang cukup
2. Pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat atau hati-hati (due audit care).
3. Penyajian yang wajar (fair presentation)
4. Kebebasan yang berarti mampu bertindak jujur dan obyektif (independence).
5. Perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam kode (ethical conduct). (Kosasih : 1993)

Pemeriksaan (auditing) dalam pelaksanaannya menyangkut review atas cara bagaimana kejadian (events) dan transaksi dalam suatu perusahaan diukur dan dikomunikasikan. Pemeriksaan tersebut secara profesional biasanya dapat digolongkan ke dalam tiga cabang yaitu :

1. Pemeriksaan independen / ekstern.
2. Pemeriksaan intern
3. Pemeriksaan instansi pemerintah.

Pada umumnya cara pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada tiga cabang pemeriksa tersebut adalah sama, perbedaannya hanya pada tingkat tanggung jawab tingkat independensi pemeriksa.

Pengertian pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan dari dalam perusahaan tersebut yang tugas dan tanggung jawabnya meninjau kembali operasi dan praktek manajerial pimpinan agar tercipta keserasian dan kesesuaian dengan kebijaksanaan dan juga melaksanakan efisiensi biaya dalam operasi perusahaan.

Pemeriksaan instansi pemerintah adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah.

Bila ditinjau dari siapa pemeriksa suatu satuan ekonomi, apakah berasal dari luar organisasi ataukah berasal dari dalam organisasi itu sendiri, maka pemeriksaan dapat dibagi dalam pemeriksaan ekstern (External Auditing) dan pemeriksaan intern (Internal auditing). Perbedaan antara kedua pemeriksa tersebut disebabkan oleh hubungan pemeriksa dengan perusahaan itu sendiri. Pemeriksa ekstern bekerja di luar perusahaan tersebut yaitu pada kantor akuntan publik.

Dalam penelitian ini akan ditetapkan pada pemeriksaan intern yang dilaksanakan pada PT. "X", maka selanjutnya yang akan dijelaskan secara lebih mendalam adalah pemeriksaan intern. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha, suatu perusahaan tentu memerlukan suatu system pengendalian yang dapat

mengamankan kekayaan perusahaan, maka diperlukan suatu system pemeriksaan intern yang dapat melaksanakan hal tersebut.

Dalam standards for the Profesional Practice of Internal Auditing, terdapat pengertian pemeriksaan intern, yaitu :

Pemeriksaan intern merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi yang memberikan jasanya bagi organisasi dengan cara menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Pernyataan ini lebih merupakan pengenalan daripada sebuah definisi, hanya menjelaskan sebagian kecil tentang apa yang termasuk dalam pemeriksaan intern, tidak memberikan indikasi tentang apa tanggung jawab auditor intern.

Dalam buku yang berjudul Auditing Prinsip dan Prosedur menyatakan bahwa pengertian pemeriksaan intern tersebut adalah

Pemeriksaan intern adalah serangkaian proses dan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dalam suatu organisasi secara independen untuk memberikan layanan informasi kepada manajemen apakah kendali akuntansi dan kendali operasi yang telah ditetapkan berjalan baik dan efektif serta apakah akuntansi dan laporan keuangan telah menunjukkan gambaran aktivitas yang sesungguhnya, teliti, lengkap dan tepat waktu beserta apakah setiap anggota organisasi mematuhi kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. (Kosasih : 1993)

Berdasarkan definisi-definisi pemeriksaan intern di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern adalah merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh seseorang auditor intern tentang operasi atau kegiatan pengendalian yang bermacam-macam dalam suatu organisasi untuk menentukan adalah :

1. Informasi keuangan dan operasi atau kegiatan perusahaan telah dapat dan diketahui dan dapat dipercaya.
2. Kemungkinan perusahaan mengalami kerugian dapat dengan cepat diketahui dan dapat segera diperkecil kemungkinannya.
3. Peraturan-peraturan ekstern, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur intern yang ditetapkan oleh perusahaan telah diikuti dan dilaksanakan dengan baik.
4. Standar yang memuaskan telah dipenuhi.
5. Sumber daya yang ada didalam perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
6. Sasaran atau tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif. hal ini bertujuan untuk membantu agar pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dilaksanakan secara efektif.

2. Tujuan dan Fungsi Pemeriksaan Intern

a. Tujuan Pemeriksaan Intern

Tujuan pemeriksaan intern menurut The Institute of Internal Auditor (1986) adalah sebagai berikut :

Membantu seluruh anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara berhasil berguna untuk mencapai tujuan tersebut pemeriksaan intern memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat mengenai kegiatan yang diperiksa. Tujuan tersebut mencakup peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang memadai.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan intern merupakan fungsi staff, yang memberikan jasa bantuan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang diperiksa.

b. Fungsi pemeriksaan intern

Pemeriksaan intern mempunyai fungsi untuk memberikan jasa bantuan bagi pimpinan perusahaan berupa jasa pemeriksaan dan penilaian, terhadap seluruh system pengendalian intern serta aktivitas perusahaan. Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut Tuannakota (1982) sebagai berikut :

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Transaksi-transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga :

- a. Memungkinkan dibuatnya ikhtisar-ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau criteria lain yang sesuai dengan ikhtisar-ikhtisar tersebut.
 - b. Menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan.
3. Penguasaan atas harta diberikan hanya dengan persetujuan atau wewenang pimpinan.
 4. Jumlah aktiva/harta perusahaan seperti yang tercantum dalam catatan perusahaan dicocokkan dengan aktiva/harta yang pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya diambil jika terjadi perbedaan.

3. Kedudukan dan Organisasi Pemeriksaan Intern

a. Kedudukan Bagian Pemeriksaan Intern Dalam Perusahaan

Berdasarkan tujuan dan fungsi pemeriksaan intern telah disajikan di atas, maka sudah sewajarnya bagian pemeriksaan intern ditempatkan pada kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi perusahaan. Kedudukan yang cukup tinggi tersebut secara organisatoris akan menjamin independensinya terhadap bagian-bagian lainnya yang diperiksa. Hal ini ditegaskan oleh Thomas Burgoss, Jr., bahwa :

Independensi berarti mempunyai pandangan tanpa sesuatu prasangka didalam melakukan pemeriksaan, didalam menilai hasil-hasil pemeriksaan itu, dan didalam menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Independensi

selain menyangkut integritas dan obyektivitas. Juga tidak kalah pentingnya adalah tingkah laku Auditor yang dapat mempengaruhi pandangan atau penilaian dari pihak yang diperiksa (Anditee) terhadap hasil pemeriksaan.

Dalam kaitannya dengan independensi dikatakan bahwa :

This two objectives are frequently indetified as independence in fact and independence in appearance. (Arens dan Loebbec : 1998)

Independence in face berarti bahwa pemeriksa melakukan tugasnya sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. Apayang ditemukan itulah yang diungkapkan dalam laporannya, dan bebas dari keterpengaruhan pihak lain. Sedangkan "*Independence in appearance*" berarti bahwa penampilan dan tindak tanduk pemeriksa haruslah menimbulkan kesan bahwa ia memang selalu bertindak bebas dan tidak memihak pada pendekatan yang bijaksana agar pihak ketiga merasa yakin bahwa pemeriksa tersebut benar-benar bebas dari pengaruh pihak yang diperiksa. Dengan demikian nilai pemeriksaan yang dilakukan tidak akan berkurang di mata pihak ketiga. Namun demikian seorang pemeriksa tidak mungkin independent secara mutlak. Karena kenyataannya pemeriksaan intern adalah bagian dari suatu organisasi perusahaan yang selalu menerima bantuan dari bagian lain, misalnya bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan lain-lain. Untuk mencapai tingkat independensi yang relatif baik

(walaupun tidak mutlak) maka letak kedudukan pemeriksaan intern harus cukup tinggi dalam suatu perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai bentuk struktur organisasi dari bagian pemeriksa intern yang berbeda-beda. Pernyataan di atas menguraikan tentang faktor-faktor yang menentukan bentuk struktur organisasi pemeriksaan intern, yaitu :

- a. Besarnya atau ukuran perusahaan
- b. Jumlah kekayaan (assets) perusahaan
- c. Kondisi system akuntansi yang ada
- d. Kendala system pengendalian intern yang ada
- e. Peranan atau fungsi yang diharapkan dari bagian pemeriksaan intern.
- f. Struktur organisasi perusahaan.

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern perlu ditetapkan secara jelas dan tertulis oleh pimpinan tertinggi dan dikomunikasikan dengan seluruh tingkat pimpinan dalam organisasi. Wewenang pemeriksaan intern meliputi semua aktivitas operasi perusahaan, seperti yang diuraikan oleh The Institute of Internal Auditor (1986) sebagai berikut :

Pemeriksaan intern berwenang meneliti catatan-catatan harta kekayaan dan pegawai yang berkaitan dengan masalah yang diperiksa, serta dapat dengan bebas menelaah dan menilai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan catatan.

Walaupun pemeriksaan intern berwenang memeriksa semua aktivitas perusahaan, namun wewenang tersebut terbatas pada pemberian rekomendasi kepada atasannya, tanpa disertai dengan wewenang garis komando. Artinya pemeriksaan intern tidak berhak mengambil tindakan perbaikan terhadap bagian yang diperiksa. Hal ini ditegaskan sebagai berikut :

Pemeriksaan intern merupakan fungsi staff dan bukan fungsi garis, karena itu ia tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pegawai-pegawai dalam organisasi yang pekerjaannya diperiksa. Pemeriksaan intern seyogyanya bebas meneliti dan menilai dan menilai kebijaksanaan, rencana dan lain-lain yang telah dijelaskan di atas, tetapi penelitian dan penilaiannya tidak membebaskan orang lain dalam organisasi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. (Cashin : 1971)

Selanjutnya tanggung jawab pemeriksa intern dinyatakan sebagai berikut :

Pemeriksa intern mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen, menunaikan tanggung jawab sesuai dengan kode etik-ikatan pemeriksaan intern, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemeriksaan intern dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga mencapai tujuan terbaik untuk tujuan pemeriksaan maupun tujuan organisasi. (The Institute of Internal Auditors : 1986)

b. Organisasi Pemeriksaan Intern

Organisasi pemeriksaan intern harus memiliki kedudukan atau status yang terdapat organisasi secara keseluruhan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan secara efektif. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan The Institute of Internal Auditor, yaitu :

The organizational status of the internal auditing department should be sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. (Standards for the Professional Practice : 1986)

Pemeriksa intern harus independen terhadap aktivitas yang diperiksa. Karena itu kedudukan organisasi pemeriksa intern harus cukup menjamin independensi dalam pemeriksaan. Dalam hubungan itu kedudukan organisasi yang terbaik adalah sebagai berikut :

Keadaan yang paling baik ialah bawah organisasi pemeriksaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, setidaknya hendaknya organisasi pemeriksaan bertanggung jawab atau melaporkan pekerjaannya kepada pejabat yang berdasarkan wewenangnya dapat segera memerintahkan perbaikan secara tepat atau mengambil langkah berdasarkan pendapat, usul-usul, atau rekomendasi pemeriksa. (Sawyer : 1982)

Selain masalah kedudukan organisasi, maka masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam kaitan dengan organisasi pemeriksaan intern adalah pengembangan struktur organisasi yang tepat. Beberapa alternatif pendekatan dalam mengembangkan struktur organisasi pemeriksaan intern adalah sebagai berikut :

Jadi struktur organisasi dapat dikembangkan paling sedikit dengan menggunakan empat pendekatan yang digunakan, yaitu berdasarkan jenis pemeriksaan, kesesuaian dengan

struktur organisasi perusahaan, wilayah, dan kombinasi pendekatan-pendekatan di atas dengan staff kantor pusat.

Setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan seyogyanya dibentuk organisasi fungsional pemeriksaan dengan jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari : penanggung jawab, pengawas, ketua tim, dan pelaksana. Masing-masing jenjang jabatan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri dan saling melengkapi.

c. Personil Pemeriksaan Intern

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan yang efektif sesuai dengan misi yang diemban organisasi pemeriksaan intern, diperlukan dukungan personil yang memadai. Persyaratan kualifikasi personil pemeriksaan intern dicantumkan kualifikasi personil pemeriksaan intern dicantumkan dalam Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD (1985) seperti dibawah ini :

Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern dan para pemeriksaannya, baik secara individu maupun kolektif, harus bertindak dengan penuh integritas dan obyektivitas. Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidaknya secara kolektif harus mempunyai keahlian yang diperlukan dalam tugasnya.

Jadi kualifikasi yang harus dimiliki oleh personil pemeriksa intern mencakup integritas, obyektivitas, dan keahlian. Pengertian integritas, obyektivitas dan keahlian, dikemukakan dalam Persyaratan Pemeriksaan intern di lingkungan SPI BUMN/BUMD (1987) sebagai berikut :

Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab, serta dapat menyimpan rahasia jabatan.

Obyektivitas adalah sikap bebas dalam mengemukakan prasangka, pendapatan pribadi, atau orang lain.
Keahlian adalah kemampuan memadukan teori dan praktik yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan/menyelesaikan tugas tertentu.

Keahlian merupakan kemampuan profesional yang dimiliki melalui pendidikan dan pengalaman, kemampuan profesional akan lebih menguntungkan apabila didukung dengan latar belakang sebagai berikut :

- Mempunyai pengetahuan mengenai akuntansi
- Mempunyai pengetahuan dalam bidang administrasi perusahaan.
- Mempunyai pengetahuan dibidang hubungan antar manusia.
- Mempunyai kepandaian dalam bidang matematika, statistika dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan data elektronik.

(Sawyer : 1982)

Sejalan dengan maksud ruang lingkup di atas. Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN / BUMD (1985) memuat ruang lingkup pemeriksaan dan intern sebagai berikut

- a. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program.

Dengan demikian ruang lingkup pemeriksaan intern adalah pemeriksaan lengkap (comprehensive audit) terhadap kegiatan objek pemeriksaan. Oleh karena itu pemeriksaan mencakup seluruh aspek kegiatan organisasi, baik keuangan maupun operasional.

Sehubungan dengan kedudukan SPI, Statement of Responsibilities of Internal Auditors (1992) menyatakan :

“The organizational status of the internal auditing function and the support accorded to it by management are major determinated of its rang and value. The head of the internal auditing function, therefore should be responsible to an officer whose authority is suffecien consideration of and effective action on the audit findings ang recommendation.”

Maksudnya status organisasi pemeriksa intern dan dukungan dari manajemen merupakan faktor penting dalam menentukan peranan dan ruang lingkup tugas pemeriksaan intern. Oleh karena itu pemeriksa intern harus bertanggung jawab kepada pejabat yang cukup tinggi yang dapat menjamin ruang lingkup pengawasan yang luas dan dan pertimbangan yang tepat terhadap saran-saran yang dibuat oleh pemeriksa intern.

5. Keterkaitan Pemeriksaan Intern Di dalam Pengendalian Intern

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, maka semakin dirasakan kebutuhan akan adanya/terlaksananya pengendalian yang baik dalam perusahaan. Sebagaimana disebutkan di atas tadi tujuan pokok dari pengendalian intern itu adalah adalah :

1. Melindungi aktiva perusahaan
2. Menjamin keakuratan dan keandalan data dan informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi dalam seluruh operasi perusahaan.
4. Mendorong kepatuhan pada kebijaksanaan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen.

Untuk mencapai keempat tujuan pokok dari pengendalian intern di atas, maka peranan pemeriksa intern sebagai salah satu unsur penunjang didalam pengendalian intern tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan yang erat antara pemeriksa intern dan pengendalian intern, seperti yang dikemukakan bukunya "Auditing Standard and Procedurs" adalah sebagai berikut :

"Internal auditing is the independent appraisal activity within an organizational for the review of the accounting, financial and other operation as a basis for protective and contractive service to management. It is a type of control with funtion by measuring and evaluating the effectiveness of other types of control. It deals primarily with accounting and financial matters but it may also property deal with matters on operating nature."
(A.W. Holmes : 1990)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan bahwa aktivitas pemeriksa intern (internal auditing) dalam suatu organisasi secara independent adalah untuk memeriksa pembukuan, keuangan dan kegiatan operasional lainnya dengan tujuan dasar untuk melindungi dan melayani kebutuhan manajemen. Hal ini merupakan suatu tipe dari fungsi pengendalian intern dengan mengukur dan mengevaluasi efectivitas pengendalian lainnya. Disini lebih menitikberatkan pada bidang akuntansi dan keuangan, namun mencakup jalannya operasi serta keadaan organisasi perusahaan.

C. Pengertian Piutang Premi

Penjualan barang dan jasa dari perusahaan pada saat ini banyak dilakukan dengan kredit sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang atau jasa sampai saat diterimanya uang. Dalam tenggang waktu tersebut penjual mempunyai tagihan kepada pembeli. Selain dari penjualan barang, atau jasa, piutang atau tagihan dapat juga timbul dari berbagai kegiatan lain seperti memberi pinjaman kepada karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan atau penjualan akitiva tetap.

Istilah piutang di sini dimaksud dengan klaim perusahaan atas uang, - barang atau jasa terhadap pihak lain. Dalam akuntansi pengertian piutang atau tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang.

Pada dasarnya piutang premi sama saja dengan piutang-piutang yang lain, hanya saja sehubungan dengan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (pertanggungan), maka piutang premi atau dikenal dengan istilah premi asuransi merupakan produk utama di dalam menjalankan kegiatan sebagai penanggung (asuradur) dalam memberikan jaminan kepada pihak kedua yang menjadi relasinya.

Pengertian piutang premi dapat penulis uraikan sebagai tagihan atau hak asuradur yang harus diterima dari tertanggung sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam polis, berkenaan dengan kewajiban asuradur untuk menjamin resiko kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung dalam masa pertanggungan (polis) dimana asuradur berjanji akan menjamin kerugian yang diderita tertanggung (secara lengkap tertuang dalam pengertian asuransi).

Berikut ini akan diberikan contoh soal tentang perhitungan premi pada salah satu jenis asuransi perorangan.

Debora (22 tahun) mengambil polis Dwiguna bertahap dengan uang pertanggungan sebesar US\$ 5.000,-. Lama kontrak 15 tahun, cara pembayaran setiap bulan.

1. Pembayaran premi tiap bulan :

$$\frac{\text{US\$ } 5.000}{1000} \times 67,10 \times 10\% = \text{US\$ } 33,55$$

$$\text{Biaya Riders} = 5\% \times \text{US\$ } 33,55 = \frac{\text{US\$ } 1,68}{\text{US\$ } 35,23}$$

Dari contoh soal di atas nilai sebesar US\$ 35,23 itulah yang berhak diterima oleh pihak penanggung (asuradur) setiap bulannya dari pemegang polis yang bersangkutan dan itulah yang sebut sebagai piutang premi.

1. Klafisifikasi Piutang

Piutang yang dimiliki perusahaan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Piutang dagang (usaha)
2. Piutang bukan dagang
3. Piutang penghasilan

Ad.1.Piutang Dagang (usaha)

Piutang dagang (piutang usaha) menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar.

Ad.2.Piutang bukan dagang

Piutang bukan dagang adalah piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan tidak termasuk dalam kelompok piutang dagang tetapi dikelompokkan tersendiri dengan judul

piutang bukan dagang (bukan usaha). Piutang bukan dagang akan dilaporkan dalam kelompok aktiva lancar apabila akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dalam siklus usaha yang normal.

Yang termasuk dalam piutang bukan usaha antara lain :

1. Persekot dalam kontrak
2. Piutang deviden
3. Piutang pesanan pembelian saham
4. Klaim terhadap restitusi pajak
5. Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian-kerugian yang dipertanggungkan, dan lain-lain.

Ad. 3. Piutang penghasilan

Penggunaan dasar waktu (accrual basis) dalam akuntansi mengakibatkan adanya pengakuan terhadap penghasilan –penghasilan seperti itu diperoleh atas dasar waktu sehingga pada akhir periode dihitung berapa jumlah yang sudah menjadi pendapatan dan jumlah tersebut dicatat sebagai piutang penghasilan. Biasanya piutang penghasilan akan diterima uangnya dalam jangka waktu relatif

pendek, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok aktiva lancar. Yang termasuk dalam piutang penghasilan antara lain :

1. Piutang pendapatan bunga
2. Piutang pendapatan sewa, dan lain-lain

Adapun jenis-jenis piutang yang akan penulis kemukakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Piutang premi
2. Pinjaman polis

Ad.1. Piutang Premi

Yaitu tagihan atau hak asuradur yang harus diterima dari tertanggung sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis berkenaan dengan kewajiban asuradur untuk menjamin resiko kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung dalam masa pertanggungan berlaku.

Ad.2. Pinjaman Polis

Yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah/pemegang polis sehingga dengan diberikannya pinjaman tersebut masih akan melanjutkan pembayaran premi.

2. Pengendalian Intern Atas Piutang

Pengendalian Intern atas piutang dimulai dari penerimaan order penjualan lalu ke persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit. Pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas/bank.

Sebelum penulis menguraikan pelaksanaan pengendalian intern piutang pada PT."X", penulis mengemukakan pengendalian intern dapat dilaksanakan secara ganda dan terkoordinir, dan dikatakan memadai bila dipandang dari prinsip-prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan, maupun secara teoritis seperti diuraikan berikut ini.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan secara ganda adalah pelaksanaan pengendalian intern yang datang dari dua arah yang paling utama, yaitu :

a. Arah yang pertama datang dari dalam perusahaan, yang dilaksanakan oleh :

(1) Atasan atau pejabat yang berwenang.

Yaitu laporan mutasi maupun outstanding premi meliputi akuntansi piutang yang dibuat, mendapatkan pengawasan dan penelitian oleh kepala seksi inkaso sebagai pejabat yang mengkoordinir kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan yang ada dan menjadi tanggung

jawab serta tugas dari bagian inkaso. Cara pelaksanaan yaitu dengan memberikan paraf pada setiap bukti pembayaran pelunasan piutang. Kemudian atas laporan outstanding premi dan penerimaan hasil penagihan, kepala seksi inkaso setelah meneliti kebenarannya memberikan paraf dan kemudian kepala bagian inkaso memberikan tanda tangannya. Penandatanganan laporan outstanding premi dan penerimaan hasil penagihan ini merupakan tugas kepala bagian inkaso sebagai pejabat yang bertanggungjawab secara keseluruhan adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban staf serta bawahannya untuk diteruskan kepada kepala cabang.

(2) Staf sendiri

Yaitu petugas yang membuat statement account dan memegang kartu piutang, sehingga jika salah satu pihak yang ada melakukan kesalahan atau penyelewengan akan segera dapat diindikasi. Karena itu harus dicocokkan antara statemen account dengan daftar outstanding premi.

- b. Arah yang kedua datang dari pihak luar yaitu tertanggung sendiri, dengan cara setelah menerima daftar statement account, tertanggung perlu memeriksa kebenarannya dengan memperbandingkan buku catatan yang ia pegang. Bila ada

perbedaan tentunya harus segera diselesaikan dengan pihak asuransi yang bersangkutan.

Statement account ini pada prinsipnya hampir sama dengan surat konfirmasi, perbedaannya terletak pada tujuan masing-masing statement account karena dilampiri surat tagihan merupakan penagihan secara terperinci dan dilakukan pada tiap-tiap akhir periode bulan yang bersangkutan, sedangkan surat konfirmasi bertujuan untuk menguatkan kebenaran saldo piutang dagang dengan perinciannya.

Agar pengendalian terhadap piutang itu baik dan memuaskan harus dipenuhi syarat-syarat yang berikut :

- (1) Fungsi yang dilakukan oleh pegawai yang menangani transaksi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pembukuan.
- (2) Fungsi penerimaan hasil tagihan piutang harus dipisahkan dari fungsi pembukuan piutang.
- (3) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan pejabat tertentu.
- (4) Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan yang lalu harus dicocokkan dalam buku besar yang bersangkutan.
- (5) Adanya daftar piutang yang berdasarkan umurnya (aging schedule).

D. Kegiatan Pemeriksaan Intern

1. Perencanaan Pemeriksaan Intern Piutang Premi

Untuk memenuhi tanggungjawab pemeriksaannya, internal auditor harus menyusun rencana kerja. Perencanaan merupakan suatu kerangka dasar untuk mencapai hasil-hasil secara efektif pada setiap organisasi. Perencanaan juga berguna sebagai alat pengendalian guna mengarahkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian penyusunan rencana pemeriksaan perlu dilakukan secara sistematis dan memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pemeriksaan maupun tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan.

Adapun tujuan pemeriksaan intern piutang premi adalah :

1. Untuk mencegah atau menemukan penyimpangan akibat :
 - a. Kecurangan
 - b. Pemborosan
 - c. Kerugian
2. Untuk menghindari terjadinya lapping pada piutang premi.
3. Untuk menjamin terlaksananya sistem dan prosedur, serta peraturan perusahaan.
4. Untuk mengetahui hasil kerja seperti pencapaian target.
5. Untuk koordinasi, supaya semua unit kerja mengarah kepada tercapainya tujuan perusahaan.

Jadi rencana pemeriksaan menyangkut sasaran pemeriksaan dan semua perangkat kerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Perencanaan Quesioner Internal Control Piutang Premi menurut

Sukrisno Agoes sebagai berikut :



	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Apakah setiap akhir bulan dibuat laporan tentang keadaan piutang premi ?			
2. Apakah dibuat surat pernyataan atau statement of account untuk setiap debitur?			
3. Apakah surat tersebut diatas dikirimkan kepada debitur sebulan sekali ?			
4. Apakah statement of account tadi dibuat atau diperiksa oleh seorang yang tidak menangani penerimaan kas atau perkreditan piutang ?			
5. Apakah dilakukan pencocokan tiap akhir bulan ?			
6. Apakah secara periodik dilakukan analisa untuk status serta kolektifibilitas dari tiap piutang ?			
7. Apakah dibuat cadangan piutang ragu-ragu secara layak?			
8. Apakah semua dokumen polis disimpan dengan baik oleh petagas yang bertanggung jawab?			
9. Apakah dilakukan verifikasi intern untuk pencatatan piutang oleh bagian akunting?			
10. Apakah semua tugas pemberian dan persetujuan polis dipisahkan dari tugas penerimaan dan pengeluaran kas?			
11. Apakah dilakukan rotasi pegawai rotasi pegawai secara berkala ?			
12. Apakah tugas bagian penagihan dipisahkan dari tugas bagian penerimaan kas ?			
Dilaksanakan :			
Direview oleh :			

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Piutang Premi

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan salah satu tahap yang penting dari rangkaian proses pemeriksaan, karena bagaimanapun bagusnya suatu perencanaan pemeriksaan, tanpa diimbangi dengan pelaksanaan yang baik di lapangan, tidak ada gunanya.

Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan meliputi aspek waktu, mutu, proses dan koordinasi pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan Internal Audit diharapkan dapat mewujudkan fungsinya secara efektif.

Hal ini agar Internal Audit bukan hanya menilai kegiatan keuangan, akan tetapi juga harus menilai segi kehematan, efisiensi, dan efektifitas operasional seluruh aktivitas perusahaan dengan melakukan operasional audit, termasuk melaksanakan tugas khusus dalam hal pengusutan dan penyelidikan. Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan dituangkan atau didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).

Kertas kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas-tugas pemeriksa. KKP tersebut mencerminkan prosedur yang ditempuh pemeriksa, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan serta komentar hasil pemeriksa, maka setiap pemeriksa wajib membuat KKP pada saat ia melaksanakan tugasnya.

a. Manfaat KKP

KKP sangat penting artinya, manfaatnya antara lain :

- * Merupakan dasar penyusunan laporan
- * Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pelaksana
- * Menyediakan data untuk keperluan referensi
- * Merupakan salah satu pedoman untuk tugas-tugas pemeriksaan tahun buku berikutnya
- * Merupakan bukti atas pekerjaan pemeriksaan

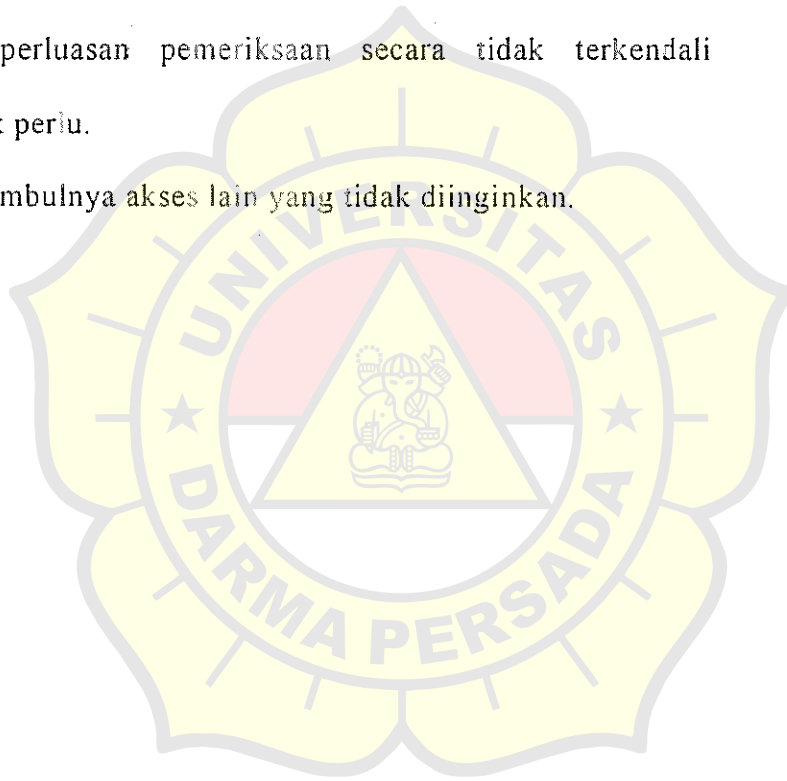
b. Syarat-syarat KKP

KKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- * Lengkap
- * Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan menyajikan informasi
- * Didasarkan atas fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi yang rasional
- * Sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi
- * Memuat hal-hal yang penting dan ada hubungannya dengan pemeriksaan
- * Mempunyai tujuan yang jelas

Pengendalian pelaksanaan pemeriksaan diperlukan untuk :

1. Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan program kerja pemeriksaan, terutama mengenai saat selesainya penugasan pemeriksaan
2. Mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dengan aparat pengawasan fungsional lain.
3. Mencegah perluasan pemeriksaan secara tidak terkendali bahkan tidak perlu.
4. Mencegah timbulnya akses lain yang tidak diinginkan.



Pelaksanaan Questioner Internal Control Piutang Premi Sukrisno Agoes sebagai berikut :

	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Apakah setiap akhir bulan dibuat laporan tentang keadaan piutang premi ?		V	Akhir tahun
2. Apakah dibuat surat pernyataan atau statement of account untuk setiap debitur?	V		Khusus pinjaman polis
3. Apakah surat tersebut diatas dikirimkan kepada debitur sebulan sekali ?	V		Pada saat pengiriman
4. Apakah statement of account tadi dibuat atau diperiksa oleh seorang yang tidak menangani penerimaan kas atau perkreditan piutang ?	V		Dan pimpinan setempat
5. Apakah dilakukan pencocokan tiap akhir bulan ?	V	V	
6. Apakah secara periodik dilakukan analisa untuk status serta kolektifibilitas dari tiap piutang ?	V		Belum dilaksanakan tapi sudah mengarah
7. Apakah dibuat cadangan piutang ragu-ragu secara layak?	V		Pinjaman pada pihak ketiga
8. Apakah semua dokumen polis disimpan dengan baik oleh petugas yang bertanggung jawab?	V		
9. Apakah dilakukan verifikasi intern untuk pencatatan piutang oleh bagian akunting?	V		
10. Apakah semua tugas pemberian dan persetujuan polis dipisahkan dari tugas penerimaan dan pengeluaran kas?	V		
11. Apakah dilakukan rotasi pegawai secara berkala ?	V		Tapi jarang
12. Apakah tugas bagian penagihan dipisahkan dari tugas bagian penerimaan kas ?			
Dilaksanakan :			
Direview oleh :			

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Intern Piutang Premi

Produk akhir dari kegiatan pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan. Laporan ini sangat penting, karena menunjukkan pemeriksaan intern terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup :

- a. Membuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan saran tindak bersifat konstruktif.
- b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik.
- c. Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.
- d. Mengemukakan suatu prestasi atau tindakan perbaikan yang telah diterapkan di unit kerja lain.
- e. Menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kepada pejabat objek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang memuat informasi dan rekomendasi perbaikan.

Rekomendasi adalah saran, anjuran tindakan perbaikan kepada pihak yang berwenang melaksanakan tindak lanjut, agar kelemahan atau kekurangan tersebut tidak berlanjut.

Sebelum memberikan rekomendasi, pemeriksa harus yakin terhadap temuan-temuan pemeriksaannya, dengan cara menelaah kembali bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama pemeriksaan.